BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Program *Three Ends*

1. Pengertian

Pengertian program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan²⁷. Program adalah unsur yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program ada beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai, tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan, dan strategi pelaksanaan²⁸.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan yaitu “*a programme is a collection of interrelated project designed to harmonize and integrate various action an activities for achieving averral policy objectives*” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan)²⁹.

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu³⁰:

²⁷ “Program”, diakses pada tanggal 3 Januari 2020 pada kbbi.web.id/program.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2008),

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, 33.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, 34.

1. Program cenderung membutuhkan orang lain, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik³¹.

Selanjutnya dalam etimologi *three ends* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Three*” dan “*Ends*”. *Three* diartikan tiga dan *Ends* dipahami dengan selesai atau tuntas atau akhiri. Dari etimologi tersebut dapat dipahami bahwa *three ends* adalah tiga hal yang akan diakhiri. Tiga hal yang akan diakhiri tersebut merupakan suatu rancangan yang telah dibuat dengan dijadikan suatu program. Jadi dapat disimpulkan bahwa Program *Three Ends* yaitu rancangan mengenai tiga hal yang akan diakhiri yang harus dijalankan. Rancangan tiga hal yang akan diakhiri tersebut adalah Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*), Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*), dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*).

Akhiri kekerasan terhadap perempuan merupakan rancangan untuk mengakhiri adanya kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia merupakan rancangan untuk mengakhiri adanya perdagangan manusia yang sering terjadi di masyarakat, dan akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan merupakan rancangan untuk mengakhiri adanya kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, 34.

2. Dasar Hukum

Program *Three Ends* sebagai program dari pusat yang juga dijalankan di daerah mengacu pada pemetaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 24 UU RI 23 Tahun 2014, hasil pemetaan urusan dari kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Menteri³². Program *three ends* sebagai program pusat dengan target pembangunan nasional bersinergi dengan daerah dalam hal kelembagaan, perencanaan dan penganggaran berdasarkan potensi unggulan daerah. Kementerian atau lembaga pemerintah melakukan pembinaan kepada daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan secara nasional³³.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah di kooordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah³⁴ dengan metode pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas³⁵ serta dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan³⁶. Hal yang penting adalah kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan Program Strategis Nasional³⁷ dan mendapat sanksi jika tidak melaksanakan berupa dikenai sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan dan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah³⁸.

³² UU RI No 23 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat (2)

³³ UU RI No 23 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat (6)

³⁴ UU RI No 23 Tahun 2014 Pasal 260 Ayat (1) dan (2)

³⁵ UU RI No 23 Tahun 2014 Pasal 261 Ayat (1)

³⁶ UU RI No 23 Tahun 2014 Pasal 262 Ayat (1)

³⁷ UU RI No 23 Tahun 2014 Pasal 67 (f)

³⁸ UU RI No 23 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat (1), (2) dan (3)

Program *Three Ends* pada Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*) mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang menjadi konstitusi ekonomi:

1. Pasal 33 Ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”³⁹. Perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah “usaha bersama” (berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang di dorong oleh *self-interest*). Asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang bukan kinsip nepotistik, sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna *brotherhood*⁴⁰.
2. Pasal 33 Ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”⁴¹. Perkataan “yang penting bagi negara” dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara. Secara singkat dikatakan bahwa “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis. Bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara tetapi makna penguasaan negara tersebut

³⁹ UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (1), (Tangerang: Tsmart, 2016), 10.

⁴⁰ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2012.

⁴¹ UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (2), 10.

dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak⁴².

3. Pasal 33 Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁴³. Posisi rakyat yang substansial (utama) ini menunjukkan ialah adanya demokrasi ekonomi dengan memperoleh justifikasinya bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-perseorang⁴⁴.
4. Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”⁴⁵. Demokrasi ekonomi artinya dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh rakyat namun dengan diwakilkan pengurusannya kepada negara⁴⁶.
5. Pasal 27 Ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁴⁷. Semua warga negara tidak ada perbedaan yang disebabkan perbedaan golongan penduduk. Dalam hal ini, penempatan segala warga negara dalam kedudukan yang

⁴² Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2012.

⁴³ UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (3), 10.

⁴⁴ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2012.

⁴⁵ UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (3), 56.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), 353.

⁴⁷ UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (1).

sama di dalam hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Pengakuan tersebut akan membawa konsekuensi adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Adanya pengakuan dan jaminan atas semua warga negara dalam kedudukan yang sama merupakan konsekuensi dipilihnya ifat kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara⁴⁸.

6. Pasal 27 Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”⁴⁹. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dari pemerintah tanpa memandang status sosial dan setiap warga negara harus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.

3. Tujuan

Program *Three Ends* pada Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*) memiliki tujuan untuk memberikan informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, berfungsinya kelembagaan tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak, berfungsinya satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di daerah, serta adanya dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, lembaga masyarakat)⁵⁰.

Pada Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*) bertujuan untuk terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak), meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia, terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan

⁴⁸ Hernadi Affandi, “Kontekstualitas Makna Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan” Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017.

⁴⁹ UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (2).

⁵⁰ “Program Prioritas/Keunggulan KPPPA 2016” oleh kemenpppa.go.id yang dipublikasikan pada Rabu 01 Juni 2016, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai⁵¹.

Selanjutnya, pada Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*) untuk perempuan memiliki tujuan untuk memastikan kementerian/lembaga menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan, menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro, dan mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator⁵².

4. Program *Three Ends* di Provinsi Sumatera Selatan

Program prioritas/unggulan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan periode 2016-2019 ini dilaksanakan dan dijalankan dengan baik di Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program *Three Ends* di daerah dengan kolaborasi komponen masyarakat dan pemerintah sebagai program yang memfasilitas mobin (mobil perlindungan) dan torlin (motor perlindungan) dan dana dekonsentrasi merupakan program yang bermanfaat dan membantu dalam hal penanganan masalah perempuan dan anak didaerah⁵³. Pemerintah kota Palembang melakukan sosialisasi program *Three Ends* di seluruh kecamatan di Palembang yang dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak Pemko Palembang⁵⁴.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan melakukan program *Three Ends* pada Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*), Akhiri

⁵¹ “Program Prioritas/Keunggulan KPPPA 2016” oleh kemenpppa.go.id yang dipublikasikan pada Rabu 01 Juni 2016, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁵² “Program Prioritas/Keunggulan KPPPA 2016” oleh kemenpppa.go.id yang dipublikasikan pada Rabu 01 Juni 2016, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁵³ Siaran Pers Nomor: B-211 /Set/Rokum/MP 01/09/2019, “*Komitmen Pimpinan Pusat dan Daerah Pacu Pembangunan PPPA*” oleh kemenpppa.go.id yang dipublikasikan pada hari Jumat, 20 September 2019.

⁵⁴ Fadli, “*Pemko Palembang Sosialisasikan Three Ends*”, *sumselsatu.com* pada tanggal 6 Agustus 2019, diakses pada tanggal 7 Desember 2019.

Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*), dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*) untuk perempuan dengan membentuk pertama sekali sebagai penguat dan pengembangan program tersebut dengan membentuk Forum PUSPA di wilayah Sumatera Selatan. Forum yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan arahan dari pusat, bersumber dari masyarakat untuk masyarakat sesuai dengan program KPPPA dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat, meningkatkan peran keluarga, dan memberikan dukungan kepada kabupaten dan kota untuk mengkoordinir suatu wadah dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak⁵⁵.

Forum Puspa yang merupakan singkatan dari Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak ini merupakan kolaborasi berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Di provinsi Sumatera Selatan sejauh ini baru terbentuk 10 forum puspa di kabupaten/kota dan diharapkan akan menyusul ad di tujuh kabupaten/kota lainnya⁵⁶. Program ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pemberian pemahaman dan mengajak elemen masyarakat untuk ikut serta dalam menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan-permasalahan yang kompleks ini.

Pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program tersebut dengan melakukan kegiatan yang telah dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah yaitu dengan memberikan bantuan logistik seperti bahan dan alat bagi perempuan yang telah memiliki keterampilan dalam berusaha dan memberikan pelatihan bagi perempuan yang belum memiliki keterampilan. Target pengentasan kemiskinan dilakukan dengan

⁵⁵ Redaktur Pelita Sumsel, “*Nelly Rosdiana Pimpin Forum PUSPA Sriwijaya*”, pelitasumsel.com pada tanggal 26 September 2017, diakses pada tanggal 7 Desember 2019.

⁵⁶ Redaksi, “*Bimtek PUG dan PUHA bagi Forum Puspa provinsi/kabupaten/kota*”, dutasumsel.com pada tanggal 13 September 2019, diakses pada tanggal 7 Desember 2019.

adanya perempuan yang ikut serta dalam bidang ekonomi seperti memiliki usaha kecil. Pada suatu daerah/desa telah dibentuk desa prima untuk membantu meningkatkan usaha kecil di daerah/desa tersebut serta meningkatkan industri rumahan yang dilakukan perempuan atau ibu rumah tangga sebagai usaha kecil atau menengah yang dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga⁵⁷.

Pada tahun 2019 setelah bergantinya kabinet baru yang menduduki jabatan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 5 (lima) isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI. Isu prioritas tersebut adalah pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Dan kelima, pencegahan perkawinan anak⁵⁸. Kasi Pemberdayaan ekonomi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan mengatakan dengan adanya isu prioritas tersebut merupakan kelanjutan program *Three Ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan untuk melakukan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan⁵⁹.

B. Akhiri Kesenjangan Ekonomi Untuk Perempuan Dalam Program *Three Ends*

1. Pengertian

Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda⁶⁰. Kesenjangan ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada

⁵⁷ Observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 5 Januari 2020.

⁵⁸ Siaran Pers Nomor: B-264/Set/Rokum/MP 01/10/2019, "*Menteri Bintang Soroti 5 Isu Prioritas Perempuan dan Anak*" oleh kemenpppa.go.id yang dipublikasikan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019.

⁵⁹ Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan ekonomi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 5 Januari 2020.

⁶⁰ "Kesenjangan" diakses pada tanggal 3 Januari 2020 pada kbbi.web.id/kesenjangan.

masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Semakin besar perbedaan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, semakin kecil perbedaan kesempatan-kesempatan tersebut, semakin kecil pula tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu negara⁶¹. Dapat diartikan bahwa kesenjangan ekonomi merupakan ketidakseimbangan manajemen rumah tangga baik di dalam keluarga, kota atau bahkan suatu negara.

Kesenjangan ekonomi maupun sosial, biasanya ada dalam beragam bentuk, seperti dalam bentuk kelas, peringkat, kekayaan, pendapatan, serta kewarganegaraan⁶². Dalam kesenjangan ekonomi, para ekonom biasanya lebih tertarik pada tiga tipe kesenjangan, yaitu kesenjangan gaji, kesenjangan pendapatan, dan kesenjangan kekayaan. Hal ini karena ketiga tipe kesenjangan tersebut lebih mudah diukur, berbeda dengan kesenjangan rasa tau gender. Dalam terminologi lain, kesenjangan ekonomi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Masing-masing perspektif memberikan wawasan mengenai sifat dasar, penyebab dan konsekuensinya terhadap kesenjangan ekonomi yang berbeda-beda.

Pertama adalah kesenjangan pendapatan (*inequality of incame*). Kesenjangan ini berfokus pada distribusi pendapatan antarindividu. Kesenjangan ini memberikan gambaran pendapatan mengenai pendapatan

⁶¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 14.

⁶² Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi* (Jakarta Selatan: Expose, 2017), 8.

individu dan rumah tangga terdistribusi dalam populasi. Kedua, kesenjangan atas kekayaan (*inequality of wealth*). Kesenjangan ini berfokus pada distribusi kekayaan antar individu atau antar rumah tangga. Kesenjangan ini merfleksikan perbedaan antara tabungan, termasuk warisan dan harta peninggalan. Ketiga, kesenjangan seumur hidup (*lifetime inequality*). Kesenjangan tipe ini berfokus pada pengukuran kesenjangan pendapatan untuk tiap individu semasa hidupnya. Terakhir, kesenjangan kesempatan (*inequality of opportunity*) yang berfokus pada hubungan antara kesenjangan pendapatan dan mobilitas sosial, terutama pada kesenjangan antar generasi⁶³.

Selain itu kesenjangan yang sering terjadi yaitu kesenjangan antar gender yang kenyataannya bahwa dalam aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan kondisi dan posisi kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Misalnya, peluang dan kesempatan yang terbatas dalam akses dan kontrol sumber daya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan. Adapun kesenjangan finansial ialah kesenjangan akses individu ke institusi keuangan formal, seperti perbankan. Laporan World Bank pada 2015, menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk dunia berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki akses ke institusi keuangan formal. Bahkan ditemukan juga akses finansial sangat eksklusif dan tidak ramah terhadap kaum perempuan, pemuda, dan masyarakat desa. Berdasarkan wilayahnya, kawasan-kawasan terbelakang di dunia, juga memiliki akses terbatas ke institusi keuangan formal.

Dalam program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan ini adalah bentuk suatu tindakan agar adanya keseimbangan manajemen rumah tangga yang baik dalam bidang ekonomi. Persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal ikut serta di bidang

⁶³ Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi*, 8-9.

ekonomi merupakan suatu hal yang dapat membantu perkembangan ekonomi dan menghapuskan kesenjangan yang terjadi.

2. Kesenjangan Ekonomi Terhadap Perempuan

Dalam hal ekonomi, laki-laki memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Kaum laki-laki juga memiliki akses yang lebih luas terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi. Kesenjangan dalam bidang ekonomi antara laki-laki dan perempuan ini bisa dilihat dari perbedaan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 14,93 juta per tahun sementara pengeluaran per kapita perempuan masih jauh di bawahnya yaitu sebesar Rp 8,75 juta per tahun⁶⁴.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan adalah pertama, terbatasnya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan minim atau lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal. Perempuan yang ingin mengembangkan usahanya dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraannya akan diperlukan modal yang memadai. Salah satu untuk mendapatkan modal tersebut dengan melakukan pinjaman ke institusi keuangan formal atau perbankan. Namun karena syarat pinjaman modal di perbankan yang merupakan institusi keuangan formal adalah harus menyertakan jaminan, sementara para kaum perempuan yang sebagian besar adalah ibu tidak memiliki jaminan, maka pada akhirnya tidak dapat memperoleh pinjaman karena syarat mengajukan kredit modal tersebut.

Kedua, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan yaitu terbatasnya kesempatan perempuan terhadap akses pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hingga bulan Februari 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah sebesar 69,32%. Namun TPAK ini masih di dominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 83,02% sementara TPAK untuk perempuan any sebesar 55,44%. Adapun dari sisi upah, pekerja laki-laki masih lebih tinggi dari pada

⁶⁴ Data Kementerian PPPA dan BPS Tahun 2018, diakses pada tanggal 6 Januari 2020.

pekerja perempuan. Bahkan selisih upah antara laki-laki dan perempuan ini dari tahun ke tahun justru semakin melebar. Rata-rata selisih upah antara gaji laki-laki dan perempuan pada tahun 2015 sebesar Rp 269 ribu, 2016 sebesar Rp 458,4 ribu, 2017 sebesar Rp 554 ribu, 2018 sebesar Rp 560,6 ribu dan hingga Februari 2019, kesenjangan semakin lebar hingga Rp 618,8 ribu⁶⁵. Belum seimbanginya TPAK dan besaran upah antara laki-laki dan perempuan membuat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di sektor ekonomi juga semakin lebar.

Ketiga, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi terhadap perempuan yaitu terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perempuan. Kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan pendidikan. Anak laki-laki di dalam keluarga, terutama dalam keluarga miskin atau pada keluarga yang ekonominya berkecukupan maka anak laki-laki tersebut lebih diupayakan untuk memperoleh pendidikan dari pada anak perempuan. Jika dalam ekonomi yang berkecukupan tersebut memiliki simpanan uang untuk biaya pendidikan anaknya, maka biaya tersebut biasanya diperuntukkan lebih dulu untuk anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Anak perempuan biasanya disuruh membantu pekerjaan domestik dalam keluarga sementara anak laki-laki disuruh melanjutkan sekolah. Proses seperti ini dalam jangka panjang juga akan mengakibatkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terutama dalam bidang ekonomi.

Keempat, yaitu terbatasnya keamanan perempuan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Sering kali mendengar kabar bahwa banyak kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh majikan atau keluarga majikan tersebut ketika bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sektor publik kekerasan terhadap perempuan juga sering terjadi. Kekerasan di ranah publik paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual sebesar 76%, kekerasan fisik sebesar 13%, kekerasan psikis sebanyak 6%

⁶⁵ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 diakses pada tanggal 6 Januari 2020.

dan *trafficking* sebanyak 5%⁶⁶. Dan masih banyaknya kasus kekerasan yang menimpa pada diri perempuan baik di ranah publik maupun di ranah privat membuat perempuan berada dalam dilema antara memilih bekerja atau tidak bekerja. Karena jika pilihannya adalah bekerja maka situasi tak aman lebih sering menghantui pada diri perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kesenjangan di bidang ekonomi terhadap perempuan.

3. Gender dan Feminisme Dalam Ekonomi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa gender adalah:

“Peran dan fungsi yang dikonstruksi masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan”

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang berlaku masyarakat, serta ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Jadi, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku tanggung jawab yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat setempat⁶⁷.

Keikutsertaan perempuan dalam bidang ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bertentangan bagi masyarakat karena peran tersebut menjadi penting bagi keluarga apabila kegiatan ekonomi yang dilakukan perempuan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender. Perbedaan gender ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan

⁶⁶ Data Komnas Perempuan Tahun 2018 diakses pada tanggal 6 Januari 2020

⁶⁷ Alifluahin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang; UB Press, 2017), 4.

utamanya bagi perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut⁶⁸.

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika perempuan menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki. Feminisme sebagai ideologi membentuk kesadaran perempuan yang belum memiliki pemahaman penuh akan pentingnya kontribusi mereka pada peningkatan perekonomian di masyarakat. Bagi perempuan yang sadar akan feminisme dan mau bertindak produktif tentu sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat kedepannya karena perempuan tidak hanya ikut di dalam kegiatan domestik saja namun mampu berperan dalam kegiatan publik yaitu dalam kegiatan ekonomi. Dari situ dapat dilihat ketika perempuan sadar akan besarnya pengaruh mereka dalam perekonomian maka pada gilirannya kaum perempuan ini dapat lebih cermat menangkap berbagai peluang untuk memajukan kondisinya sendiri sehingga akan berlaku lebih produktif dan hal tersebut akan berdampak pada perekonomian⁶⁹.

Peningkatan perekonomian yang dimaksud ialah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Perekonomian mempunyai kata dasar *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan per- dan -an sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup⁷⁰.

Beberapa kegiatan unggulan dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi anatar lain memastikan kementerian/lembaga terkait menjalankan

⁶⁸ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar: 1999), 9.

⁶⁹ Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara*, (Bandung: Rineka Cipta, 2009), 66.

⁷⁰ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24.

program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan, menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro dan mengemangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator⁷¹.

Beberapa perempuan seringkali kurang menyadari akan perannya yang sangat potensial di dalam perekonomian, maka dari itu fiminisme sebagai stimulus penggerak bagi perempuan sangat perlu diupayakan. Sejumlah studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan ketimpangan gender. Kesetaraan gender memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi⁷².

Tokoh penggerak feminisme di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan emansipasi perempuan yaitu R.A. Kartini, yang ingin memperjuangkan nasib kaum perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Dalam bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”, yang merupakan kumpulan dari surat-surat RA Kartini yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaum perempuan dari diskriminasi yang sudah membudaya⁷³.

Dengan adanya kesadaran feminisme, perempuan akan lebih mengerti akan kemampuan dirinya sebagai pribadi dan dalam mengisi peran sosialnya. Perempuan yang sadar pentingnya ideologi feminisme pada dirinya akan memberikan arah pada perubahan nilai-nilai yang merupakan bagian integral dari berlangsungnya proses pembangunan baik dalam perekonomian maupun yang lainnya dimana kaum perempuan berperan sebagai objek ataupun subjek pembangunan⁷⁴.

⁷¹ Ali Said, dkk., *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 4.

⁷² Ali Said, dkk., *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*, 6.

⁷³ Ali Said, dkk., *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*, 3.

⁷⁴ Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 81.

C. Perempuan

1. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Dalam pandangan Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan adalah sama dalam esensi kemanusiaannya. Maka dilihat dari aspek ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia itu sama mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa pembedaan. Dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang asal penciptaan perempuan dalam firman-Nya⁷⁵:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki dan perempuan yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah Swt. Memang, secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai kedudukan terhormat⁷⁶.

Selain itu, Ayat Al-Qur'an yang banyak dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal penciptaan perempuan adalah firman Allah Swt yaitu Surat An-Nisa Ayat 1:⁷⁷

⁷⁵ Q.S. Al-Hujurat Surah Ke-13 Ayat 13.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 358.

⁷⁷ Q.S. An-Nisa Surah Ke-4 Ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”

Al-Qur’an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Secara umum Surat An-Nisa Ayat 32⁷⁸ menunjukkan hak-hak perempuan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَسَبْنَ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,”

Tujuan utama Allah Swt memberikan kesempatan hidup di dunia adalah agar manusia termasuk perempuan dapat bekerja dengan baik. Hal ini diisyaratkan dalam Surat Al-Mulk Ayat 2⁷⁹:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

⁷⁸ Q.S. An-Nisa Surah Ke-4 Ayat 32.

⁷⁹ Q.S. Al-Mulk Surah Ke-67 Ayat 2.

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Dalam ayat ini setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dituntut untuk dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melakukan tugas-tugasnya. Maka kalau ada orang yang enggan untuk berusaha, apalagi kalau itu adalah tugas utamanya baik laki-laki maupun perempuan, sungguh orang tersebut telah melalaikan kewajiban utamanya ini. Al-Qur'an dalam pengertian umum mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin dan mempunyai hak dan kewajiban yang setara dan sejajar dalam berbagai bidang⁸⁰.

Pesan-pesan Al-Qur'an ini adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap perempuan. Dalam dunia yang didominasi oleh peran laki-laki dalam hampir semua aspek kehidupan sejak zaman dahulu hingga sekarang, pesan ini sangat signifikan. Betapa banyak orang laki-laki yang memandang sebelah mata terhadap peran, kedudukan, dan aktivitas perempuan sebagai makhluk tak bermakna dan tak berdaya, dan karena itu bebas memperlakukan perempuan sebagai warga masyarakat kelas dua yang boleh disia-siakan, dihina, dipinggirkan (dimarjinalisasikan), bahkan dicampakkan sehingga teralienasi dalam kontelasi kehidupan masyarakat sosial.

Banyak kelompok etnis di dunia ini yang tidak memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pendidikan yang memadai dan aktivitas lain yang dapat meningkatkan perannya dalam kehidupan sejajar atau paling tidak mendekati peran laki-laki. Seringkali anak-anak perempuan menjadi objek *trafficking*, menjadi objek pemuasan syahwat atau sekedar menjadi pembantu rumah tangga di rumah-rumah orang kaya dengan penghasilan yang kadang-kadang ala kadarnya, karena ketiadaan keterampilan memadai untuk memilih pekerjaan layak dan

⁸⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 39.

bermartabat. Padahal Al-Qur'an telah memberi perhatian khusus terhadap perempuan untuk berkreasi, beribadah beramal saleh, berprestasi dalam berbagai bidang sesuai kemampuan dengan tetap memelihara hak dan kewajiban, kehormatan, keanggunan, serta martabat sebagai perempuan. Orang-orang yang berada di sekeliling perempuan juga diimbau oleh Al-Qur'an untuk tidak menyalahgunakan kaum perempuan di tengah-tengah dominasi laki-laki di hampir banyak sektor kehidupan dan di berbagai belahan dunia⁸¹.

2. Kedudukan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi

Kedudukan perempuan sebagai makhluk individu dan sosial, menunjukkan perempuan mempunyai hak dan dapat menentukan kehendak pribadinya. Perempuan bergerak di dalam masyarakat dan mengerti akan dirinya dan menyadari perannya, bahwa dirinya mampu dan dapat bekerja dalam membantu kehidupan rumah tangganya. Peran wanita dalam keluarga merupakan peranan yang dilaksanakan perempuan karena menduduki posisi di masyarakat. Peran perempuan dalam keluarga melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, melayani suami merupakan suatu kegiatan produktif yang secara tidak langsung menambah pendapatan keluarga⁸².

Keikutsertaan perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memajukan daerah merupakan perwujudan dari perannya secara dinamis dari kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem sosial tempat perempuan tersebut berada. Bekerja adalah kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan uang, barang dan jasa, mengeluarkan energy dan mempunyai nilai waktu. Kedudukan dan peranan perempuan dalam sistem mata pencaharian sangat menentukan bukan saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga

⁸¹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Kedudukan dan Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Perpustakaan Nasional RI, 2009), 262-263.

⁸² Indah Aswiyati, "Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat", dalam *Jurnal Holistik* Tahun IX No.17 / Januari-Juni 2016.

menanggulangi kekurangan dalam menambah biaya ekonomi rumah tangga.

Islam memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dengan laki-laki, memberikan kecakapan untuk berbuat dan bertindak melakukan hak-haknya. Mereka diperkenankan melakukan kegiatan perekonomian (mu'amalah) dengan menjadi pedagang, pengusaha, produsen, distributor dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Mengenai bidang ekonomi perempuan adalah *agent of development* yang perannya sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian.

Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri. Lebih dari seabad lalu telah dikemukakan oleh Kartini, bahwa tiap perempuan mesti memiliki kemandirian secara ekonomi, agar dirinya punya kuasa dan posisi dalam hubungan domestik, keluarga dan lingkungan sosial. Adanya program dari pemerintah pusat dalam pengembangan yang melibatkan peran perempuan dan anak dilakukan secara holistik, terintegrasi dan guna mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk meningkatnya kesejahteraan saat perempuan menjadi kaum terdidik, memiliki hak-hak dan bebas untuk bekerja, sehingga mempunyai pendapatan dan mandiri. Pemberdayaan ekonomi perempuan harus dilakukan dengan menanamkan semangat dan keinginan untuk bekerja keras. Islam memerintahkan kepada umat-Nya untuk berusaha dan bekerja keras sebagai sarana menggapai ridha-Nya, yaitu dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105⁸³:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

⁸³ Q.S. At-Taubah Surah Ke-9 Ayat 105.

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda⁸⁴:

أَخَذَ أَكَلَ مَا ((: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ الْمَقْدَامِ
عَلَيْهَا سَلَامَ دَاوُدَ اللَّهِ نَبِيِّ وَإِنَّ يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ أَنْ مِنْ خَيْرًا قَطُّ مَا طَعَا
الْبُخَارِيِّ رَوَاهُ ((يَدِهِ مِنْ عَمَلٍ كَانَ يَأْكُلُ

Dari Miqdam Radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud a.s. makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)"

Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa "Tangan diatas jauh lebih baik daripada tangan di bawah" dan tidak diperkenankan umat-Nya untuk mengemis-ngemis. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-bukhari juga Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW, berkata⁸⁵:

لَأَنْ يَخْتَبِ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَسْأَلُ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْتَعَهُ

"Sungguh seorang dari kalian memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya"

Bahkan Ibnu Khaldun, sosiolog Islam kenamaan di Abad Pertengahan menyatakan bahwa sudah menjadi watak dasardan bawaan manusia untuk senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya yang telah

⁸⁴ H.R. Bukhari, No.1966

⁸⁵ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: KENCANA, 2015), 52.

diciptakan Allah SWT kepadanya. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia telah diberikan motivasi dan spirit naluriah untuk berusaha dan bekerja keras.

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah perempuan dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Mengingat akan kesetaraan gender atau tanggung jawab membangun peradaban, maka perempuan memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kaumnya. Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, yakni:

- 1) Memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan, sehingga kaum perempuan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik; dan
- 2) Melakukan transformasi sosial budaya melalui bidang ekonomi khususnya strategi pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan.

Pemberdayaan perempuan yang akan mengacu pada kesejahteraan ekonomi yang perlu dikembangkan memiliki lima komponen⁸⁶:

- 1) Kesadaran perempuan tentang harga dirinya;
- 2) Hak mereka untuk mempunyai dan menentukan pilihan;
- 3) Hak mereka untuk mempunyai peluang untuk berkembang dan akses terhadap sumber daya hidup;
- 4) Hak mereka untuk mengontrol kehidupan pribadi, baik di dalam maupun di luar rumah tangga; dan
- 5) Kemampuan mereka untuk berperan dalam proses perubahan sosial untuk menciptakan kehidupan yang adil secara kemasyarakatan dan ekonomi, baik taraf nasional maupun internasional.

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Pada dasarnya hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi

⁸⁶ Amany Lubis, dkk, *Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Tangerang: Pustaka Cendekian Muda, 2018), 108.

dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan⁸⁷. Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah⁸⁸. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam⁸⁹.

Berdasarkan uraian sejumlah definisi di atas dapat dipahami terdapat dua konsep yang umum muncul dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, perniagaan, yang di dasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

2. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan kedua sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qu’ran dan As-Sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan Hadits kadang kala bersifat

⁸⁷ Rahmat Soemitro dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 5-6.

⁸⁸ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

⁸⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi⁹⁰. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum al-quran* dan *ulum al-hadis*, meliputi tiga hukum⁹¹:

1. Hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (*mukalaf*)
2. Hukum-hukum etika (*akhlak*) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meniggalkan kejelekan.
3. Hukum-hukum praktis (*'amaliyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah*) dalam aspek ini lahirilah Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan lain kalimat, hukum Islam dengan karakteristik yang khas mempunyai sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan dalam⁹²:

- a. Sumber *naqly*, yakni sumber hukum dimana mujtahid tidak berperan dalam pembentukannya, yang termasuk sumber hukum naqli dan As-sunnah.
- b. Sumber *Aqly*, yakni suatu sumber hukum di mana seorang mujtahid dengan akalannya dapat berperan dalam pembentukannya seperti Qiyas, Istihsan, dan lain-lain.

Disisi lain sumber hukum Islam dapat pula dibedakan dalam:

- a. Sumber hukum *Ashliyah*, sumber hukum yang penggunaannya tidak tergantung pada sumber yang lain, yakni Al-Qur'an dan As-sunnah.
- b. Sumber hukum *Taba'iyah*, sumber hukum yang penggunaannya bersandarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti Ijma', Qiyas, Istishab, dan lain-lain.

⁹⁰ Abd Shomad, "*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

⁹¹ Abd Shomad, "*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", 31.

⁹² Abd Shomad, "*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", 31.

Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial di dasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Oleh karenanya hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah terutama kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda)⁹³.

Negara Republik Indonesia memberikan keluluasan aspirasi masyarakat untuk dapat mengamalkan ajaran agama termasuk untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Namun, dalam konteks sistem hukum nasional di Indonesia hukum ekonomi syariah akan mendapatkan kekuatan hukum dan bersifat mengikat ketika mendapatkan penguatan dan legitimasi dari pemerintah dalam bentuk positivasi hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan berbagai produk hukum lainnya yang mengakomodasi berbagai hukum ekonomi syariah⁹⁴.

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu⁹⁵:

- a. Al-Qur'an

Yaitu Kalamullah yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui Bahasa Arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber

⁹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 2-3.

⁹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 4.

⁹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 4.

utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam. Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup antara lain hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah*), hukum-hukum acara dan keadilan, hukum-hukum pidana (*jinayah*), hukum-hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional, dan sebagainya.

b. Sunnah Nabi

Yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah Saw. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama di dasarkan pada QS. *An-nisaa*, (4):59 dan QS. *Al-Hasyr* (59):7. Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu 1) penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an, 2) penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan, 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari segi tingkatan berdasarkan jumlah periwayat, Hadis terbagi tiga yaitu mutawatir, masyhur dan ahad.

c. Kesepakatan ulama (*ijma'*)

Yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Saw. Pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hukum syara. *Ijtihad* yang dilakukan dalam *ijma'* ulama mengandung sejumlah unsur yaitu: 1) adanya pengerahan daya nalar secara maksimal; 2) *ijtihad* dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (*faqih*), 3) usaha *ijtihad* dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum)

tertentu, dan 4) produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah.

d. Analogi (qiyas)

Qiyas ialah menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*. Rukun qiyas ada empat, yaitu: 1) sesuatu yang tertentu/telah tertentu (*ashal*); 2) hukum sesuatu yang telah tertentu (*hukum ashal*); 3) '*ilah*; dan 4) sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan *ashal* karena persamaan '*illat (far'un)*.

2. Sumber Sekunder (*mashadir tabi'iyah*) yaitu sumber-sumber hukum yang masih dipersilahkan penggunaannya sebagai hujah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan produk penalaran manusia⁹⁶:

- a. Istihsan ialah menerjemahkan *qiyas khafi* yang sukar dipahami atau mengecualikan masalah *juziyah* daripada *qaidah 'ammah*, berdasarkan kepada dalil tertentu serta kejelasan atau kekuatan kebaikannya.
- b. *Masalah al-mursalah*, menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarata: 1) maslahat mursalah itu tidak bertentangan dengan maksud *syara'*; 2) maslahat mursalah itu diterima oleh akal-akal yang matang dan yakin; 3) maslahat mursalah itu menyeluruh untuk ke semua atau kelayakan manusia.
- c. '*Urf*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan. Berdasarkan kebenaran '*Urf* terbagi kepada: 1) '*urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak nyata mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 2) '*urf fasid*, kebiasaan yang nyata mengharamkan yang haram atau kebiasaannya yang nyata bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

⁹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 6.

- d. *Syar'u man Qablana*, yaitu ketentuan hukum Allah Swt, yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw.
- e. *Mazhab sahabat*, ialah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud syara'. Orang tersebut sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan ia beriman dan mati di dalam Islam.
- f. *Istishhab*, ialah menghukum dengan nada atau tiadanya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang berdasarkan kepada ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa lalu, karena bukti tiada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah keadaan.
- g. *Sadd al-dzara'i*, yaitu menghindari dari terjadinya sesuatu keburukan.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu⁹⁷:

- a. Ketuhanan (*ilahiyyah*) yaitu bahwa dalam aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan seta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT⁹⁸. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia baik yang dilakukan laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi (*syumul*).
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta

⁹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

⁹⁸ Rahmat Soemitro dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 5-6.

isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.

- c. *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (mudharat) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil huu tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga keseimbangan kebaikan generasi yang akan datang.
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
- e. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al- ashlu fi al- muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.
- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah *Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan*

yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubah*. Setelah itu, dalam Q.S. An-Nisaa’ (4): 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradhin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang *mubah* dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.

- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya⁹⁹. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Saat ini industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu Industri Makanan Halal, Industri Pakaian Halal, Industri Keuangan Halal, Industri Bisnis Perjalanan Halal, Industri Obat dan Kosmetik Halal, dan Industri Media dan Rekreasi Halal.

⁹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8-9.